WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 665 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SURVEI *GEOTAGGING* DATA MASYARAKAT RENTAN SOSIAL (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, BALITA *STUNTING*, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JAMBAN TIDAK SEHAT)

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin menjalankan fungsinya dalam melaksanakan kordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin perlu data yang lengkap hingga kordinat geografis untuk setiap Kepala Keluarga yang termasuk dalam daftar masyarakat rentan sosial di Kota Banjarmasin;

b. data geografis ini diperlukan untuk memudahkan Pemerintah Kota Banjarmasin berkordinasi terkait program-program penanggulangan kemiskinan, baik berupa penyaluran bantuan ataupun pemberdayaan masyarakat agar dapat dilakukan berbasis lokasi/ wilayah. Di samping itu juga untuk memudahkan evaluasi dampak program yang sudah dijalankan terhadap masyarakat penerima manfaat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Survei *Geotagging* Data Masyarakat Rentan Sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Balita *Stunting*, Rumah Tidak Layak Huni, Penerima Bantuan Sosial, dan Jamban Tidak Sehat);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Survei *Geotagging* Data Masyarakat Rentan Sosial yang terdiri dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Balita *Stunting*, Rumah Tidak Layak Huni, Penerima Bantuan Sosial dan Jamban Tidak Sehat di Kota Banjarmasin ditetapkan untuk memudahkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dengan Susunan dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 November 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 665 TAHUN 2022
TENTANG
TIM SURVEI *GEOTAGGING* DATA MASYARAKAT RENTAN SOSIAL (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, BALITA *STUNTING*, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, PENERIMA BANTUAN SOSIAL, DAN JAMBAN TIDAK SEHAT)

SUSUNAN TIM SURVEI *GEOTAGGING* DATA MASYARAKAT RENTAN SOSIAL (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, BALITA *STUNTING*, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JAMBAN TIDAK SEHAT)

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Perencana | | | | | |
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Ketua | Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan geotagging data masyarakat rentan sosial | - | - |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Sekretaris | Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) | - | - |
| 3. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Anggota | | - | - |
| 4. | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya | Anggota | | - | - |
| 5. | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan | Anggota | | - | - |

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Anggota | | - | - |
| Tim Pelaksana Tahap I | | | | | |
| 1. | Gusti Muhammad Syachreza F. | Koordinator Surveyor | Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan survei sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain:<br>a. persiapan;<br>b. koordinasi dengan Ketua RT/ Petugas Puskesmas/ Kader Posyandu setempat;<br>c. melakukan pengumpulan data lapangan; dan<br>d. melaporkan hasil yang diperoleh. | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 2. | Ridwan | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 3. | Tommy Tori Haga | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 4. | Yogi Prasakti | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 5. | Fiqi Alif Pratama | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 6. | Muhammad Namiruddin Khifdi Maulana | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 7. | Yessyca Dian Patriani Marbun | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 8. | Muhammad Sulaiman Jazuli | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 9. | Muhammad Sahrul | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 10. | Said Muhammad Zakaria | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 11. | Muhammad Aditya Najmi | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Willyardi Alif Raharjo | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 13. | Nur Komala | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 14. | Elfira Chaterine Wibowo | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 15. | M. Riduan | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 16. | Febriannor Alhaviz | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 17. | Muhammad Indra | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 18. | Arbainah | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 19. | Ananta Dandy Rukmana | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 20. | Endi Saputra | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 21. | M. Khairuddin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| Tim Pelaksana Tahap II | | | | | |
| 1. | Fiqi Alif Pratama | Koordinator Surveyor | Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan survei sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain:<br>a. persiapan;<br>b. koordinasi dengan Ketua RT/ Petugas Puskesmas/ Kader | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 2. | Muhammad Namiruddin Khifdi Maulana | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 3. | Willyardi Alif Raharjo | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Nur Komala | Petugas Survei | Posyandu setempat;<br>c. melakukan pengumpulan data lapangan; dan<br>d. melaporkan hasil yang diperoleh. | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 5. | Elfira Chaterine Wibowo | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 6. | M. Khairuddin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 7. | Juliana Gultom | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 8. | Faisal Amin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 9. | Billy Jeremia | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 10. | Muhammad Adzan Ansyari | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 11. | Nurita Gustin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 12. | Muhammad Alif Virgiawan | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 13. | Mukhlisin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 14. | Sabrina Adha Atifa | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 15. | Rezka Salsabila | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 16. | Rahmad Adam Fahlefi | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 17. | Luthfi Afify | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Febriannoor Alhaviz | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| Tim Pelaksana Tahap III | | | | | |
| 1. | Fiqi Alif Pratama | Koordinator Surveyor | Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan survei sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain:<br>a. persiapan;<br>b. koordinasi dengan Ketua RT/ Petugas Puskesmas/ Kader Posyandu setempat;<br>c. melakukan pengumpulan data lapangan; dan<br>d. melaporkan hasil yang diperoleh. | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 2. | Muhammad Namiruddin Khifdi Maulana | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 3. | Willyardi Alif Raharjo | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 4. | Nur Komala | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 5. | Elfira Chaterine Wibowo | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 6. | M. Khairuddin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 7. | Juliana Gultom | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 8. | Faisal Amin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 9. | Billy Jeremia | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 10. | Muhammad Adzan Ansyari | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 11. | Nurita Gustin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Muhammad Alif Virgiawan | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 13. | Mukhlisin | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 14. | Sabrina Adha Atifa | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 15. | Rezka Salsabila | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 16. | Rahmad Adam Fahlefi | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 17. | Luthfi Afify | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| 18. | Febriannor Alhaviz | Petugas Survei | | Rp75.000,00 x 15 hari = Rp1.125.000,00 | OH |
| Pengolah Data | | | | | |
| 19. | A. Baihaki | Pengolah Data | Melaksanakan Administrasi Data hasil survei *Geotagging* | Rp1.463.000,00 x 1 Paket = Rp1.463.000,00 | Paket Pekerjaan |
| 20. | Nurul Huda | Pengolah Data | | Rp1.463.000,00 x 1 Paket = Rp1.463.000,00 | Paket Pekerjaan |
| 21. | Viona Regita Cahaya Iskandar | Pengolah Data | | Rp1.463.000,00 x 1 Paket = Rp1.463.000,00 | Paket Pekerjaan |
| 22. | Nur Aida | Pengolah Data | | Rp1.463.000,00 x 1 Paket = Rp1.463.000,00 | Paket Pekerjaan |
| 23. | Inu Kencana Hadi, M.Sc | Pengolah Data | | Rp1.463.000,00 x 1 Paket = Rp1.463.000,00 | Paket Pekerjaan |

| No | Jabatan / Nama | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Pengawas | | | | | |
| 1. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah | Ketua | a. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan survei;<br>b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan<br>c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan survei. | - | - |
| 2. | Muhammad Hazrianto, S.Pd | Anggota | Membantu mengawasi pelaksanaan dan pelaporan hasil *geotagging* data masyarakat rentan sosial | - | - |
| 3. | Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng | Anggota | | - | - |
| 4. | Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | 2 (dua) orang |

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA